



RESOLUSI KONFLIK

PADA MASYARAKAT MAJEMUK

Prof. Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum.
Krisbowo Laksono, S.Ud., M.Hum.



Editor: Dr. H. Moh. Bisri, M.Pd.



RESOLUSI KONFLIK PADA MASYARAKAT MAJEMUK

Prof. Dr. Yusup Rohmaḍi, M.Hum.
Krisbowo Laksono, S.Uḍ.,M.Hum.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

RESOLUSI KONFLIK PADA MASYARAKAT MAJEMUK

Penulis:

Prof. Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum.

Krisbowo Laksono, S.Ud., M.Hum.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. H. Moh. Bisri, M.Pd.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 87, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-140-0

Cetakan Pertama:

Januari 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, dimana buku Resolusi Konflik dalam Masyarakat Majemuk ini bisa terbit. Buku ini merupakan sari dari hasil penelitian yang dilakukan di daerah Klaten dimana daerah ini menjadi percontohan bagaimana suatu masyarakat menjaga kerukunan antara umat. Keterlibatan berbagai organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan mampu membangun kedamaian sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik di masyarakat melalui kegiatan Bersama.

Masyarakat majemuk merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa modern. Keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan kepentingan, di satu sisi merupakan kekayaan yang memperkuat identitas kolektif, namun di sisi lain berpotensi melahirkan konflik apabila tidak dikelola secara adil dan bijaksana. Dalam konteks inilah, rekonsiliasi konflik menjadi sebuah urgensi yang tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga preventif dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Konflik sosial yang berkepanjangan tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga luka psikologis, trauma kolektif, serta retaknya kepercayaan antar kelompok. Tanpa upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh, konflik berisiko diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, rekonsiliasi harus dipahami sebagai proses strategis untuk memulihkan relasi sosial, membangun kembali kepercayaan, serta menciptakan ruang dialog yang setara dan inklusif.

Buku Rekonsiliasi Konflik dalam Masyarakat Majemuk menawarkan kerangka pemikiran, strategi, serta model-model rekonsiliasi yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial. Berbagai pendekatan yang dibahas mulai dari dialog antar kelompok, keadilan restoratif, rekonsiliasi berbasis kearifan lokal, hingga peran negara dan masyarakat sipil diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana konflik dapat ditransformasikan menjadi peluang bagi penguatan kohesi sosial.

Lebih dari sekadar kajian teoritis, buku ini juga menekankan pentingnya praktik dan pembelajaran dari berbagai pengalaman rekonsiliasi yang telah diterapkan di masyarakat majemuk. Dengan menggabungkan analisis konseptual dan contoh penerapan, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, praktisi perdamaian, serta

siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap upaya membangun kehidupan sosial yang damai dan bermartabat.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya diskursus tentang resolusi dan rekonsiliasi konflik, serta menginspirasi lahirnya inisiatif-inisiatif perdamaian yang berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Semoga buku ini bermanfaat.

Surakarta, 19 Januari 2026

Penulis

Yusup Rohmadi
Krisbowo Laksono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Konflik dalam Masyarakat Majemuk	1
B. Realitas Kemajemukan Sosial	5
C. Permasalahan dan Tantangan Resolusi Konflik	10
BAB II KONSEP DASAR KONFLIK SOSIAL.....	15
A. Pengertian Konflik Sosial.....	15
B. Jenis Konflik dalam Masyarakat	18
C. Penyebab Konflik Sosial	23
D. Dinamika Konflik dalam Masyarakat Majemuk	28
E. Dampak Konflik terhadap Kehidupan Sosial	32
BAB III MASYARAKAT MAJEMUK DAN MULTIKULTURALISME	38
A. Pengertian Masyarakat Majemuk	38
B. Karakteristik Masyarakat Majemuk	39
C. Multikulturalisme sebagai Pendekatan Sosial	43
D. Integrasi Sosial dalam Masyarakat Majemuk.....	46
BAB IV TEORI DAN PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK.....	51
A. Pengertian Resolusi Konflik.....	51
B. Tujuan Resolusi Konflik.....	52
C. Pendekatan Negosiasi dan Mediasi dalam Resolusi Konflik	56
D. Peran Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik.....	60
BAB V STRATEGI RESOLUSI KONFLIK PADA MASYARAKAT MAJEMUK	65
A. Pencegahan Konflik Berbasis Partisipasi	65
B. Dialog Antarbudaya dan Antaragama dalam Resolusi Konflik	69
C. Penguatan Modal Sosial	74
BAB VI STUDI KASUS RESOLUSI KONFLIK DI KLATEN	79
DAFTAR PUSTAKA.....	83
BIODATA PENULIS.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG KONFLIK DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Masyarakat majemuk merupakan realitas sosial yang ditandai oleh keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan latar belakang sosial ekonomi. Kemajemukan tersebut terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, termasuk migrasi, kolonisasi, dan perkembangan sosial politik. Dalam pandangan sosiologis, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok sosial dengan sistem nilai dan identitas yang berbeda, namun hidup dalam satu kesatuan wilayah dan struktur politik yang sama. Furnivall (1948) menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah *“a society in which different sections of the community live side by side, but separately, within the same political unit.”* Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak selalu diikuti oleh integrasi sosial yang kuat.

Dalam konteks masyarakat majemuk, konflik sosial menjadi fenomena yang sulit dihindari. Perbedaan kepentingan, nilai, dan identitas antarkelompok sering kali memicu ketegangan sosial, terutama ketika sumber daya yang tersedia bersifat terbatas. Coser (1956) menjelaskan bahwa *“social conflict is a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources,”* sehingga konflik muncul sebagai bagian dari interaksi sosial yang dinamis. Apabila perbedaan tersebut tidak dikelola melalui mekanisme sosial dan institusional yang adil, konflik dapat berkembang menjadi kekerasan sosial yang mengancam stabilitas dan kohesi masyarakat.

Selain faktor perbedaan identitas, konflik dalam masyarakat majemuk juga dilatarbelakangi oleh ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, akses terhadap kekuasaan, serta pengakuan sosial sering kali memperkuat rasa ketidakpuasan kelompok tertentu. Galtung (1969) menyebut kondisi ini sebagai *kekerasan struktural*, yaitu situasi di mana struktur sosial secara sistematis menciptakan ketidaksetaraan dan membatasi peluang hidup kelompok tertentu. Oleh karena

itu, konflik dalam masyarakat majemuk tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan perbedaan, melainkan sebagai akibat dari interaksi kompleks antara identitas, struktur sosial, dan kebijakan publik.

1. Kemajemukan sebagai Realitas Sosial

Masyarakat majemuk merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern. Kemajemukan tersebut tercermin dalam perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, budaya, adat istiadat, serta latar belakang sosial dan ekonomi. Dalam perspektif sosiologis, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang tersusun atas berbagai kelompok sosial yang memiliki sistem nilai dan identitas yang berbeda-beda, namun hidup dalam satu kesatuan wilayah dan sistem politik yang sama. Furnivall (1948) menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah *“a society in which different sections of the community live side by side, but separately, within the same political unit.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa kemajemukan sering kali ditandai oleh koeksistensi kelompok-kelompok yang berbeda tanpa integrasi sosial yang kuat.

Di satu sisi, kemajemukan merupakan kekayaan sosial yang berpotensi memperkaya dinamika budaya, memperluas perspektif sosial, serta memperkuat modal sosial masyarakat. Namun di sisi lain, kemajemukan juga mengandung potensi konflik apabila tidak dikelola secara adil dan inklusif. Perbedaan identitas yang tajam dapat memunculkan prasangka, stereotip, dan diskriminasi antarkelompok, yang pada akhirnya berujung pada konflik sosial terbuka. Oleh karena itu, konflik dalam masyarakat majemuk tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena individual, melainkan sebagai gejala struktural yang berakar pada relasi sosial yang kompleks.

2. Konflik sebagai Fenomena Sosial

Konflik merupakan bagian inheren dari kehidupan sosial. Setiap masyarakat, baik homogen maupun majemuk, tidak pernah sepenuhnya terbebas dari konflik. Coser (1956) menyatakan bahwa *“social conflict is a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources.”* Konflik muncul ketika individu atau kelompok berusaha mempertahankan kepentingan, nilai, dan identitasnya, terutama dalam situasi keterbatasan sumber daya.

Dalam masyarakat majemuk, potensi konflik menjadi lebih besar karena adanya perbedaan nilai, kepentingan, dan identitas yang saling berinteraksi. Konflik tidak selalu bersifat negatif; dalam batas tertentu, konflik dapat berfungsi sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian struktur sosial. Namun, konflik yang tidak terkelola dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan sosial yang merusak tatanan kehidupan masyarakat dan mengancam integrasi nasional.

Menurut Dahrendorf (1959), konflik sosial sering kali bersumber dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Ia menyatakan bahwa *“conflict arises from the differential distribution of authority in society.”* Dalam konteks masyarakat majemuk, ketimpangan akses terhadap kekuasaan, sumber daya ekonomi, dan pengakuan sosial antar kelompok dapat memperkuat potensi konflik laten yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik terbuka.

3. Perbedaan Identitas dan Politik Pengakuan

Salah satu latar belakang utama konflik dalam masyarakat majemuk adalah persoalan identitas. Identitas sosial—baik etnis, agama, maupun budaya—menjadi dasar bagi individu dan kelompok untuk membangun rasa kebersamaan (*sense of belonging*). Namun, identitas juga dapat menjadi sumber eksklusivisme yang memicu konflik ketika digunakan untuk membedakan “kami” dan “mereka”.

Taylor (1994) dalam teorinya tentang *politics of recognition* menegaskan bahwa pengakuan terhadap identitas kelompok merupakan kebutuhan fundamental dalam masyarakat modern. Ia menyatakan bahwa *“nonrecognition or misrecognition can inflict harm, can be a form of oppression.”* Ketika suatu kelompok merasa identitasnya diabaikan, direndahkan, atau didiskriminasi, maka konflik sosial menjadi respons yang hampir tak terelakkan.

Dalam masyarakat majemuk, konflik berbasis identitas sering kali diperparah oleh narasi eksklusif yang dikonstruksi secara sosial dan politis. Identitas agama dan etnis, misalnya, dapat dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan, sehingga memperlebar jurang perbedaan dan meningkatkan eskalasi konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik dalam masyarakat majemuk tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial dan dinamika politik yang melingkupinya.

4. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi sebagai Akar Konflik

Selain faktor identitas, ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan latar belakang penting konflik dalam masyarakat majemuk. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan layanan publik sering kali tumpang tindih dengan perbedaan identitas kelompok. Hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan struktural yang memperkuat rasa frustrasi dan ketegangan sosial.

Galtung (1969) memperkenalkan konsep *structural violence* untuk menjelaskan bagaimana ketidakadilan sosial yang sistemik dapat menjadi sumber konflik. Ia menyatakan bahwa “*violence is built into the structure and shows up as unequal power and consequently as unequal life chances.*” Dalam masyarakat majemuk, kekerasan struktural ini sering kali dialami oleh kelompok minoritas atau kelompok yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.

Ketika ketimpangan tersebut tidak direspons melalui kebijakan publik yang adil dan partisipatif, konflik sosial menjadi saluran ekspresi kekecewaan kolektif. Oleh karena itu, konflik dalam masyarakat majemuk tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang timpang.

5. Lemahnya Integrasi Sosial dan Modal Sosial

Integrasi sosial merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas masyarakat majemuk. Menurut Durkheim (1893), integrasi sosial berkaitan dengan tingkat solidaritas yang mengikat individu dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat yang tingkat integrasinya rendah, konflik lebih mudah muncul karena lemahnya ikatan sosial antar kelompok.

Putnam (2000) menekankan pentingnya modal sosial dalam menciptakan kepercayaan dan kerja sama sosial. Ia menyatakan bahwa “*social capital refers to connections among individuals—social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness.*” Dalam masyarakat majemuk, lemahnya modal sosial lintas kelompok (*bridging social capital*) dapat memperbesar potensi konflik karena kurangnya komunikasi dan saling pengertian.

Ketika interaksi sosial antar kelompok terbatas, prasangka dan stereotip negatif cenderung berkembang. Kondisi ini menciptakan konflik laten yang dapat dengan mudah dipicu oleh isu-isu sensitif, seperti agama, etnis, atau politik.

6. Peran Negara dan Kebijakan Publik

Negara memiliki peran strategis dalam mengelola kemajemukan dan mencegah konflik sosial. Kebijakan publik yang diskriminatif atau tidak sensitif terhadap keberagaman justru dapat memperparah konflik. Menurut Rothstein (1998), legitimasi institusi publik sangat menentukan keberhasilan pengelolaan konflik sosial. Ia menyatakan bahwa *“the legitimacy of political institutions is crucial for social cohesion in divided societies.”*

Dalam masyarakat majemuk, negara dituntut untuk bersikap netral, adil, dan inklusif dalam merumuskan kebijakan. Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan dan keadilan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dapat memicu ketidakpercayaan dan konflik horizontal.

7. Konflik dan Tantangan Masyarakat Majemuk

Di era globalisasi dan digitalisasi, konflik dalam masyarakat majemuk menghadapi tantangan baru. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, termasuk narasi kebencian dan disinformasi yang dapat memicu konflik identitas. Castells (2010) menyatakan bahwa *“power is constructed in the communication space.”* Artinya, konflik sosial di era digital tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang virtual yang sulit dikendalikan.

Oleh karena itu, memahami latar belakang konflik dalam masyarakat majemuk menjadi prasyarat penting bagi upaya resolusi konflik yang berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif—meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya—diperlukan untuk mengelola perbedaan secara konstruktif dan menjaga kohesi sosial.

B. REALITAS KEMAJEMUKAN SOSIAL

Realitas kemajemukan sosial merupakan kondisi objektif yang melekat dalam kehidupan masyarakat modern. Setiap masyarakat pada dasarnya terdiri atas individu dan kelompok dengan latar belakang yang beragam, baik dari segi suku bangsa, agama, budaya, bahasa, maupun kondisi sosial ekonomi. Kemajemukan tersebut terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, seperti migrasi, perdagangan, penjajahan, dan perkembangan politik. Furnivall

(1948) menyatakan bahwa masyarakat majemuk adalah *“a society in which different sections of the community live side by side, but separately, within the same political unit.”* Pandangan ini menunjukkan bahwa kemajemukan tidak selalu diikuti oleh integrasi sosial yang kuat, sehingga memerlukan pengelolaan yang bijaksana.

Dalam perspektif sosiologis, kemajemukan sosial tidak hanya mencerminkan perbedaan, tetapi juga hubungan timbal balik antarkelompok sosial. Perbedaan nilai, norma, dan sistem kepercayaan membentuk identitas kolektif yang menjadi dasar interaksi sosial. Menurut Koentjaraningrat (2009), kebudayaan merupakan *“keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat,”* sehingga keberagaman budaya menjadi unsur penting dalam realitas kemajemukan sosial. Interaksi antarbudaya yang tidak dilandasi oleh saling pengertian berpotensi menimbulkan prasangka dan ketegangan sosial.

Di sisi lain, realitas kemajemukan sosial juga menghadirkan tantangan berupa ketimpangan sosial dan lemahnya integrasi sosial. Perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan sering kali beririsan dengan perbedaan identitas sosial, sehingga memperkuat potensi konflik laten. Galtung (1969) menyebut kondisi ini sebagai *kekerasan struktural*, yaitu situasi di mana struktur sosial secara sistematis menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, realitas kemajemukan sosial menuntut adanya pendekatan sosial dan kebijakan publik yang inklusif agar perbedaan dapat dikelola sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan.

1. Kemajemukan Sosial sebagai Kenyataan Historis

Kemajemukan sosial merupakan realitas yang melekat dalam kehidupan masyarakat manusia sejak awal peradaban. Tidak ada masyarakat yang benar-benar homogen, karena manusia selalu hidup dalam perbedaan latar belakang budaya, bahasa, kepercayaan, dan struktur sosial. Kemajemukan terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, seperti migrasi, penaklukan wilayah, perdagangan, penyebaran agama, serta dinamika politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, kemajemukan sosial bukanlah fenomena baru, melainkan hasil interaksi sosial yang terus berlangsung dan berkembang dari waktu ke waktu.

Furnivall (1948) mengemukakan konsep masyarakat majemuk sebagai *“a society in which different sections of the community live side by side, but separately, within the same political unit.”* Pandangan ini

menegaskan bahwa kemajemukan sering kali ditandai oleh kehidupan bersama dalam satu wilayah politik, namun dengan tingkat integrasi sosial yang rendah. Kelompok-kelompok sosial hidup berdampingan, tetapi mempertahankan identitas, nilai, dan pola hidup masing-masing. Kondisi tersebut menjadikan kemajemukan sebagai realitas yang kompleks dan penuh tantangan.

Dalam masyarakat modern, kemajemukan semakin menguat seiring dengan globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi. Perpindahan penduduk lintas wilayah dan negara membawa serta identitas sosial dan budaya yang beragam, sehingga memperkaya struktur sosial masyarakat sekaligus meningkatkan kompleksitas hubungan antarkelompok. Oleh karena itu, kemajemukan sosial harus dipahami sebagai kondisi objektif yang membentuk wajah masyarakat kontemporer.

2. Dimensi-Dimensi Kemajemukan Sosial

Kemajemukan sosial tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional. Salah satu dimensi utama kemajemukan adalah perbedaan etnis dan budaya. Setiap kelompok etnis memiliki bahasa, adat istiadat, dan sistem nilai yang khas, yang membentuk identitas kolektif anggotanya. Menurut Koentjaraningrat (2009), kebudayaan adalah *“keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat.”* Dengan demikian, perbedaan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari kemajemukan sosial.

Selain dimensi etnis dan budaya, kemajemukan juga tercermin dalam perbedaan agama dan keyakinan. Agama berfungsi sebagai sistem makna yang memberikan orientasi moral dan spiritual bagi penganutnya. Namun, perbedaan penafsiran dan praktik keagamaan dapat menjadi sumber dinamika sosial yang kompleks. Durkheim (1912) menyatakan bahwa agama merupakan *“a unified system of beliefs and practices relative to sacred things,”* yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial dalam kelompok. Akan tetapi, dalam masyarakat majemuk, solidaritas internal tersebut sering kali berhadapan dengan kelompok lain yang memiliki sistem kepercayaan berbeda.

Dimensi lain dari kemajemukan sosial adalah stratifikasi sosial dan ekonomi. Perbedaan kelas sosial, tingkat pendidikan, dan akses terhadap sumber daya menciptakan lapisan-lapisan sosial yang tidak setara.

Ketimpangan ini sering kali beririsan dengan perbedaan identitas etnis dan agama, sehingga memperkuat kompleksitas kemajemukan sosial dan potensi ketegangan di dalamnya.

3. Kemajemukan Sosial dan Identitas Kolektif

Identitas kolektif merupakan elemen penting dalam realitas kemajemukan sosial. Identitas memberikan rasa memiliki dan kebersamaan bagi individu dalam suatu kelompok. Tajfel dan Turner (1979) dalam teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu cenderung mengategorikan diri mereka ke dalam kelompok sosial tertentu untuk membangun harga diri dan makna sosial. Identitas tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan solidaritas internal.

Namun, dalam masyarakat majemuk, identitas kolektif tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga dapat menjadi batas sosial yang memisahkan kelompok satu dengan lainnya. Ketika identitas dipahami secara eksklusif dan kaku, kemajemukan berpotensi memunculkan prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Taylor (1994) menekankan pentingnya pengakuan identitas dalam masyarakat multikultural dengan menyatakan bahwa *“recognition is not just a courtesy we owe people, but a vital human need.”*

Oleh karena itu, realitas kemajemukan sosial menuntut adanya pengelolaan identitas secara inklusif. Pengakuan terhadap perbedaan identitas harus diiringi dengan upaya membangun kesadaran akan kesamaan sebagai warga masyarakat dan bangsa. Tanpa pendekatan ini, kemajemukan dapat berubah dari potensi kekayaan sosial menjadi sumber konflik yang berkepanjangan.

4. Integrasi Sosial dalam Masyarakat Majemuk

Integrasi sosial merupakan isu sentral dalam realitas kemajemukan sosial. Durkheim (1893) membedakan antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik sebagai dasar integrasi sosial. Dalam masyarakat modern yang majemuk, solidaritas organik—yang didasarkan pada saling ketergantungan antarindividu dan kelompok—menjadi landasan utama integrasi sosial.

Namun, integrasi dalam masyarakat majemuk tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan institusi sosial dan kebijakan publik yang mampu menjembatani perbedaan dan menciptakan ruang interaksi yang setara. Parsons (1951) menyatakan bahwa sistem sosial yang stabil



BAB II

KONSEP DASAR KONFLIK SOSIAL

A. PENGERTIAN KONFLIK SOSIAL

Konflik sosial merupakan salah satu fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat, baik yang sederhana maupun yang kompleks, selalu diwarnai oleh perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan antarindividu maupun antarkelompok. Dalam perspektif sosiologi, konflik tidak selalu dipandang sebagai gejala patologis, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang melekat pada proses interaksi manusia. Oleh karena itu, pemahaman tentang konflik sosial menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat berubah, beradaptasi, dan mempertahankan keseimbangannya.

Konflik sosial muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan realitas sosial, terutama dalam hal distribusi sumber daya, kekuasaan, dan pengakuan sosial. Dalam konteks ini, konflik tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup ketegangan laten, pertentangan nilai, serta persaingan kepentingan yang berlangsung secara struktural. Dengan demikian, konflik sosial harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang mencerminkan hubungan sosial yang tidak seimbang.

1. Pengertian Konflik Sosial Menurut Lewis A. Coser

Salah satu tokoh penting dalam kajian konflik sosial adalah Lewis A. Coser. Dalam karyanya *The Functions of Social Conflict* (1956), Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai “*a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources, in which the aims of the conflicting parties are not only to gain the desired values but also to neutralize, injure, or eliminate rivals.*” Definisi ini menekankan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan perebutan sumber daya yang terbatas, tetapi juga dengan upaya mempertahankan atau meningkatkan posisi sosial suatu kelompok.

Coser memandang konflik sebagai fenomena yang dapat memiliki fungsi positif bagi masyarakat. Konflik dapat memperjelas batas-batas kelompok, memperkuat solidaritas internal, serta mendorong perubahan sosial. Dengan demikian, konflik sosial tidak selalu bersifat destruktif, melainkan dapat menjadi mekanisme adaptif dalam sistem sosial apabila dikelola secara konstruktif.

2. Pengertian Konflik Sosial Menurut Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf memberikan kontribusi penting dalam memahami konflik sosial melalui perspektif struktural. Dalam bukunya *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959), Dahrendorf menyatakan bahwa konflik sosial berakar pada distribusi otoritas yang tidak merata dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa “*conflict arises from the differential distribution of authority in society.*” Menurut Dahrendorf, setiap struktur sosial mengandung potensi konflik karena adanya kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai.

Pandangan Dahrendorf menegaskan bahwa konflik sosial bukanlah penyimpangan dari keteraturan sosial, melainkan konsekuensi logis dari struktur sosial itu sendiri. Konflik menjadi motor perubahan sosial karena mendorong negosiasi ulang terhadap distribusi kekuasaan dan otoritas. Dengan demikian, konflik sosial memiliki peran penting dalam dinamika masyarakat modern.

3. Pengertian Konflik Sosial Menurut Karl Marx

Karl Marx memandang konflik sosial sebagai inti dari kehidupan sosial dalam masyarakat kelas. Menurut Marx, konflik sosial terutama bersumber dari pertentangan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang memiliki posisi berbeda dalam sistem produksi. Dalam *The Communist Manifesto* (1848), Marx dan Engels menyatakan bahwa “*the history of all hitherto existing society is the history of class struggles.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik sosial dipandang sebagai kekuatan utama yang menggerakkan sejarah manusia.

Bagi Marx, konflik sosial tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga material, karena berkaitan dengan kepemilikan alat-alat produksi. Konflik antara kelas borjuis dan proletar mencerminkan ketimpangan struktural yang melekat dalam sistem kapitalisme. Oleh karena itu, konflik sosial dalam pandangan Marx bersifat inheren dan tidak dapat dihilangkan tanpa perubahan struktur ekonomi dan sosial secara

mendasar.

4. Pengertian Konflik Sosial Menurut Georg Simmel

Georg Simmel melihat konflik sebagai bentuk interaksi sosial yang memiliki fungsi integratif. Dalam pandangannya, konflik merupakan salah satu cara individu dan kelompok menegaskan eksistensi dan identitasnya. Simmel menyatakan bahwa konflik dapat memperkuat hubungan sosial karena memaksa pihak-pihak yang berkonflik untuk berinteraksi dan bernegosiasi. Dalam karyanya, ia menekankan bahwa konflik adalah *“a form of socialization”* yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial.

Pandangan Simmel menunjukkan bahwa konflik sosial tidak selalu merusak hubungan sosial, tetapi justru dapat memperkuat struktur sosial melalui penyesuaian dan kompromi. Dengan demikian, konflik sosial dipahami sebagai bagian normal dari dinamika masyarakat.

5. Pengertian Konflik Sosial Menurut Johan Galtung

Johan Galtung memperluas pemahaman konflik sosial dengan memperkenalkan konsep segitiga konflik yang mencakup kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Menurut Galtung (1969), *“violence is built into the structure and shows up as unequal power and consequently as unequal life chances.”* Definisi ini menekankan bahwa konflik sosial tidak selalu tampak dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dalam struktur sosial yang tidak adil.

Galtung memandang konflik sebagai kondisi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan aktor sosial yang saling bergantung. Resolusi konflik, menurutnya, harus mencakup transformasi struktur sosial dan budaya yang melanggar ketidakadilan. Oleh karena itu, pengertian konflik sosial menurut Galtung bersifat holistik dan transformatif.

6. Pengertian Konflik Sosial Menurut Soerjono Soekanto

Dalam konteks Indonesia, Soerjono Soekanto memberikan definisi konflik sosial yang banyak dijadikan rujukan. Ia menyatakan bahwa konflik sosial adalah *“suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain, yang disertai ancaman dan/atau kekerasan.”* Definisi ini menekankan adanya proses interaksi sosial yang bersifat antagonistik.

Soerjono Soekanto juga menekankan bahwa konflik sosial merupakan bagian dari proses sosial yang wajar, sejajar dengan kerja sama dan persaingan. Namun, konflik dapat menjadi destruktif apabila tidak dikendalikan oleh norma dan institusi sosial yang berlaku.

7. Pengertian Konflik Sosial Menurut Para Ahli Lain

Selain para tokoh di atas, banyak ahli lain yang memberikan definisi konflik sosial. Robbins (2001) mendefinisikan konflik sebagai “*a process in which an effort is purposely made by one party to block another party's efforts in the pursuit of its interests.*” Definisi ini menyoroti aspek intensional dan prosesual dalam konflik sosial.

Sementara itu, Fisher et al. (2000) memandang konflik sebagai hubungan antara pihak-pihak yang memiliki tujuan yang tidak sejalan dan merasa bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai secara bersamaan. Definisi ini menekankan dimensi persepsi dalam konflik sosial, di mana konflik tidak hanya ditentukan oleh kondisi objektif, tetapi juga oleh cara aktor sosial memaknai situasi yang dihadapi.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Konflik melibatkan pertentangan kepentingan, nilai, dan kekuasaan, serta dipengaruhi oleh struktur sosial dan persepsi subjektif aktor yang terlibat. Konflik sosial tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat berfungsi sebagai mekanisme perubahan sosial apabila dikelola secara konstruktif.

Pemahaman yang komprehensif tentang pengertian konflik sosial menurut para ahli menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi resolusi konflik yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa pemahaman teoretis yang kuat, upaya penanganan konflik berisiko bersifat parsial dan tidak menyentuh akar permasalahan.

B. JENIS KONFLIK DALAM MASYARAKAT

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Keberadaan konflik muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, dan latar belakang sosial antarindividu maupun antarkelompok. Dalam masyarakat yang dinamis dan majemuk, konflik hadir dalam berbagai bentuk dan tingkat intensitas, mulai

dari konflik sederhana dalam kehidupan sehari-hari hingga konflik sosial berskala luas. Coser (1956) menyatakan bahwa *“conflict is a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources,”* yang menunjukkan bahwa konflik tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki ragam jenis sesuai dengan kepentingan dan sumber pertentangannya.

Jenis konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan aktor yang terlibat, posisi sosial, maupun sumber penyebabnya. Berdasarkan aktor, konflik dapat terjadi antarindividu, antarkelompok, atau antara masyarakat dan negara. Sementara itu, berdasarkan posisi sosial, konflik dibedakan menjadi konflik horizontal dan konflik vertikal. Soekanto (2012) menjelaskan bahwa konflik sosial adalah *“suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan.”* Definisi ini memperlihatkan bahwa konflik memiliki variasi bentuk dan mekanisme yang berbeda dalam struktur sosial masyarakat.

Selain itu, konflik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, seperti konflik ekonomi, politik, kultural, dan ideologis. Konflik ekonomi berakar pada ketimpangan akses terhadap sumber daya, sedangkan konflik kultural dan ideologis berkaitan dengan perbedaan nilai, norma, dan keyakinan. Galtung (1969) menegaskan bahwa konflik sering kali berkaitan dengan *kekerasan struktural*, di mana *“violence is built into the structure and shows up as unequal power and consequently as unequal life chances.”* Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis konflik dalam masyarakat menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan dan resolusi konflik yang adil dan berkelanjutan.

1. Konflik sebagai Fenomena Sosial yang Beragam

Konflik merupakan fenomena sosial yang hadir dalam berbagai bentuk dan tingkat intensitas dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan konflik tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa masyarakat terdiri atas individu dan kelompok dengan latar belakang, kepentingan, nilai, dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam perspektif sosiologi, konflik dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak selalu bersifat destruktif, tetapi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme perubahan sosial. Oleh karena itu, konflik dalam masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan beragam jenisnya sesuai dengan aktor, kepentingan, dan struktur sosial yang melingkupinya.

Coser (1956) menyatakan bahwa *“conflict is a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources,”* yang menunjukkan bahwa konflik dapat muncul dalam berbagai konteks sosial. Perbedaan kepentingan dan nilai tersebut kemudian melahirkan beragam bentuk konflik, mulai dari konflik antarindividu hingga konflik berskala luas yang melibatkan kelompok sosial atau negara. Pemahaman mengenai jenis-jenis konflik dalam masyarakat menjadi penting untuk menentukan pendekatan penanganan dan resolusi konflik yang tepat.

2. Konflik Antarindividu

Konflik antarindividu merupakan jenis konflik yang paling sederhana dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konflik ini terjadi antara dua orang atau lebih akibat perbedaan kepentingan, persepsi, emosi, atau tujuan pribadi. Konflik antarindividu biasanya muncul dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun komunitas sosial yang berskala kecil. Robbins (2001) mendefinisikan konflik sebagai *“a process in which an effort is purposely made by one party to block another party’s efforts in the pursuit of its interests.”* Definisi ini relevan untuk menjelaskan konflik antarindividu yang sering kali dipicu oleh persaingan atau kesalahpahaman.

Meskipun bersifat mikro, konflik antarindividu dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik personal yang berlarut-larut dapat memengaruhi hubungan sosial dan kinerja kelompok, serta berpotensi memicu konflik antarkelompok apabila individu-individu tersebut mewakili kepentingan kelompok tertentu.

3. Konflik Antarkelompok Sosial

Konflik antarkelompok merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok sosial atau lebih yang memiliki identitas, kepentingan, atau tujuan yang berbeda. Kelompok sosial tersebut dapat berbentuk kelompok etnis, agama, kelas sosial, atau organisasi. Menurut Soerjono Soekanto (2012), konflik sosial adalah *“suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai ancaman dan/atau kekerasan.”* Dalam konflik antarkelompok, pertentangan biasanya lebih intens karena melibatkan solidaritas kelompok dan identitas kolektif.

Konflik antarkelompok sering kali dipicu oleh perebutan sumber daya, diskriminasi, atau ketimpangan struktural. Ketika konflik ini melibatkan identitas etnis atau agama, eskalasinya cenderung lebih cepat dan sulit dikendalikan karena menyentuh aspek emosional dan simbolik yang mendalam.

4. Konflik Vertikal dan Konflik Horizontal

Berdasarkan posisi aktor yang terlibat, konflik dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas, seperti negara atau pemerintah. Dahrendorf (1959) menyatakan bahwa “*conflict arises from the differential distribution of authority in society*,” yang menegaskan bahwa konflik vertikal berakar pada ketimpangan distribusi kekuasaan dan otoritas.

Sebaliknya, konflik horizontal terjadi antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki posisi relatif sejajar dalam struktur sosial. Konflik horizontal sering kali terjadi antar kelompok etnis, agama, atau komunitas lokal. Konflik jenis ini kerap dipicu oleh isu identitas dan perebutan sumber daya lokal, serta dapat berkembang menjadi konflik komunal yang meluas.

5. Konflik Struktural

Konflik struktural merupakan konflik yang bersumber dari ketidakadilan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Konflik ini tidak selalu tampak dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi terwujud dalam ketimpangan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan. Johan Galtung (1969) menyebut kondisi ini sebagai *kekerasan struktural*, yaitu situasi di mana “*violence is built into the structure and shows up as unequal power and consequently as unequal life chances*.”

Konflik struktural sering kali bersifat laten dan berlangsung dalam jangka panjang. Kelompok yang terpinggirkan secara struktural dapat menyimpan rasa ketidakpuasan yang sewaktu-waktu meledak menjadi konflik terbuka. Oleh karena itu, konflik struktural menjadi salah satu jenis konflik yang paling sulit diselesaikan karena memerlukan perubahan mendasar dalam sistem sosial dan kebijakan publik.

6. Konflik Kultural dan Ideologis

Konflik kultural dan ideologis merupakan konflik yang bersumber dari perbedaan nilai, norma, keyakinan, dan pandangan hidup. Konflik ini sering kali berkaitan dengan agama, ideologi politik, atau sistem nilai budaya. Coser (1956) menyatakan bahwa konflik yang menyangkut nilai inti cenderung lebih intens dan sulit dikompromikan karena berkaitan dengan identitas dan keyakinan fundamental suatu kelompok.

Dalam masyarakat majemuk, konflik kultural dan ideologis menjadi tantangan serius karena menyentuh aspek simbolik dan emosional. Perbedaan penafsiran terhadap nilai dan keyakinan dapat memicu konflik yang berkepanjangan apabila tidak dikelola melalui dialog dan pendekatan yang inklusif.

7. Konflik Ekonomi dan Kelas Sosial

Konflik ekonomi dan kelas sosial merupakan jenis konflik yang berakar pada ketimpangan kepemilikan sumber daya dan posisi dalam sistem produksi. Karl Marx memandang konflik kelas sebagai inti dari konflik sosial. Dalam *The Communist Manifesto* (1848), Marx dan Engels menyatakan bahwa “*the history of all hitherto existing society is the history of class struggles.*” Konflik ini terjadi antara kelas yang memiliki alat produksi dan kelas yang hanya memiliki tenaga kerja.

Konflik ekonomi tidak hanya terbatas pada pertentangan kelas, tetapi juga mencakup konflik akibat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan. Dalam banyak kasus, konflik ekonomi beririsan dengan konflik identitas, sehingga memperkuat eskalasi konflik sosial.

8. Konflik Politik dan Kekuasaan

Konflik politik merupakan konflik yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan, pengaruh, dan legitimasi dalam sistem politik. Konflik ini dapat terjadi antara partai politik, elite politik, maupun antara masyarakat dan negara. Menurut Lasswell (1958), politik berkaitan dengan “*who gets what, when, and how,*” sehingga konflik politik muncul sebagai konsekuensi dari perebutan sumber daya kekuasaan.

Konflik politik sering kali berdampak luas karena melibatkan kebijakan publik dan stabilitas negara. Dalam masyarakat majemuk, konflik politik yang memanfaatkan isu identitas dapat dengan mudah berubah menjadi konflik sosial yang lebih luas.

9. Konflik Laten dan Konflik Terbuka

Berdasarkan tingkat manifestasinya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik laten dan konflik terbuka. Konflik laten adalah konflik yang tersembunyi dan belum muncul ke permukaan, tetapi potensi ketegangannya sudah ada. Sementara itu, konflik terbuka adalah konflik yang telah diekspresikan secara nyata melalui pertentangan, kekerasan, atau aksi kolektif. Menurut Galtung (1969), konflik laten sering kali berkaitan dengan kekerasan struktural yang belum terartikulasikan secara eksplisit.

Pemahaman mengenai konflik laten menjadi penting dalam upaya pencegahan konflik. Dengan mengenali gejala konflik laten sejak dini, masyarakat dan negara dapat mengambil langkah preventif sebelum konflik berkembang menjadi konflik terbuka yang destruktif.

10. Sintesis Jenis Konflik dalam Masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik dalam masyarakat memiliki berbagai jenis dan bentuk yang saling berkaitan. Konflik dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok, maupun struktural, serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Pemahaman mengenai jenis-jenis konflik dalam masyarakat menjadi landasan penting dalam merancang strategi resolusi konflik yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan mengenali karakteristik masing-masing jenis konflik, penanganan konflik dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa konflik bukanlah fenomena tunggal, melainkan realitas sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional.

C. PENYEBAB KONFLIK SOSIAL

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan muncul sebagai akibat dari interaksi sosial yang melibatkan perbedaan kepentingan, nilai, serta struktur kekuasaan. Dalam masyarakat yang dinamis dan majemuk, konflik sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian tujuan antarindividu maupun antarkelompok sosial. Coser (1956) menjelaskan bahwa *“social conflict is a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources,”* yang menunjukkan bahwa konflik

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Pearson.
- Bar-Tal, D. (2000). *Shared Beliefs in a Society: Social Psychological Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood.
- Burton, J. (1990). *Conflict: Resolution and Provention*. London: Macmillan.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Collier, P., et al. (2003). *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*. Washington DC: World Bank.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Durkheim, E. (1912). *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press.
- Fisher, R., & Ury, W. (1991). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2000). *Getting to Yes*. New York: Penguin Books.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2000). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.

- Furnivall, J. S. (1948). *Colonial Policy and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Geertz, C. (1963). *The Integrative Revolution*. New York: Free Press.
- Furnivall, J. S. (1948). *Colonial Policy and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Galtung, J. (1969). "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Geertz, C. (1963). *The Integrative Revolution*. New York: Free Press.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books.
- Gurr, T. R. (1970). *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University Press.
- Knitter, P. (2002). *Introducing Theologies of Religions*. Maryknoll: Orbis Books.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.
- Lasswell, H. D. (1958). *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: Meridian Books.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: USIP Press.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*. London.
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Nasikun. (2015). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism*. London: Macmillan.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work*. Princeton University Press.

- Parekh, B. (2000). *Rethinking Multiculturalism*. London: Macmillan.
- Paris, R. (2004). *At War's End: Building Peace After Civil Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2011). *When Groups Meet: The Dynamics of Intergroup Contact*. Psychology Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone*. New York: Simon & Schuster.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Robbins, S. P. (2001). *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Rothstein, B. (1998). *Just Institutions Matter*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rothstein, B. (1998). *Just Institutions Matter*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Simmel, G. (1955). *Conflict and the Web of Group Affiliations*. New York: Free Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." Dalam *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Monterey: Brooks/Cole.
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press.
- UNESCO. (2011). *The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education*. Paris: UNESCO.
- Zartman, I. W. (2000). *Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond*. In P. C. Stern & D. Druckman (Eds.), *International Conflict Resolution After the Cold War*.

BIODATA PENULIS

Penulis 1



- Nama : Yusup Rohmadi
- Tempat/tanggal lahir : Klaten, 02 Februari 1963.
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Pekerjaan : Dosen
- Alamat rumah : Jonggrangan RT 06 RW 03 Desa Demaikjo,
Kec. Karangnongko Kab. Klaten Prov.
Jawa Tengah
- Email : yusup.rh@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
1985	Sarjana Muda Kurikulum dan Teknologi Pendidikan IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
1992	Sarjana Filsafat Universitas Gajahmada Yogyakarta
2007	Magister Ilmu Filsafat Universitas Gajahmada Yogyakarta
2017	Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang

PENGALAMAN KERJA

Tahun	Jabatan / Bidang Pekerjaan
1994	PNS Fak Ushuluddin IAIN Walisongo di Surakarta
2002-2006	Sekretaris Program D2 PGMI STAIN Surakarta
2026-2010	Ketua Jurusan Ushuluddin STAIN Surakarta
2010-2011	Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STAIN Surakarta
2011-2015	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Surakarta

Penulis 2



Krisbowo Laksono lahir di Semarang pada tahun 1985 dan menghabiskan masa kecil serta pendidikannya di Magelang, Jawa Tengah. Latar sosial dan budaya yang religius serta intelektual di lingkungan tempat ia tumbuh membentuk minatnya yang mendalam terhadap dunia pemikiran Islam dan refleksi filosofis tentang kehidupan. Sejak masa studi, ia menunjukkan ketertarikan besar pada isu-isu yang berkaitan dengan teologi, spiritualitas, dan dinamika kesadaran beragama dalam masyarakat modern. Saat ini, Krisbowo Laksono aktif sebagai dosen di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Dalam perannya sebagai pendidik dan peneliti, ia mengampu berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan filsafat Islam, teologi klasik dan kontemporer, serta pemikiran Islam modern. Selain mengajar, ia juga aktif membimbing mahasiswa dalam penelitian akademik, terutama pada tema-tema yang menyinggung persoalan eksistensial, etika, dan rasionalitas iman di tengah perubahan sosial yang cepat. Konsistensinya dalam mengkaji dan menulis di bidang aqidah dan filsafat Islam telah mengantarkannya pada berbagai karya ilmiah, baik berupa artikel jurnal, makalah seminar, maupun buku. Melalui tulisan-tulisannya, Krisbowo berupaya menjembatani antara nilai-nilai spiritualitas Islam dan kerangka berpikir filosofis yang rasional dan terbuka. Ia percaya bahwa agama dan filsafat tidak semestinya dipertentangkan, melainkan dipadukan sebagai dua jalan menuju kearifan yang sama: pencarian akan kebenaran dan makna hidup yang lebih dalam. Bagi Krisbowo, menjadi dosen bukan sekadar profesi, tetapi juga pengabdian intelektual dan spiritual. Ia memandang pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter berpikir kritis, sekaligus arena untuk menumbuhkan kesadaran etis dan religius di kalangan mahasiswa. Pandangan hidup dan akademiknya berakar pada keyakinan bahwa ilmu, iman, dan kemanusiaan harus berjalan beriringan, saling menerangi, dan saling memperkaya. Melalui karya dan dedikasinya, ia ingin terus berkontribusi dalam membangun wacana keislaman yang relevan dengan tantangan zaman sekaligus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

RESOLUSI KONFLIK

PADA MASYARAKAT MAJEMUK

Masyarakat majemuk merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa modern. Keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan kepentingan, di satu sisi merupakan kekayaan yang memperkuat identitas kolektif, namun di sisi lain berpotensi melahirkan konflik apabila tidak dikelola secara adil dan bijaksana. Dalam konteks inilah, rekonsiliasi konflik menjadi sebuah urgensi yang tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga preventif dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Konflik sosial yang berkepanjangan tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga luka psikologis, trauma kolektif, serta retaknya kepercayaan antar kelompok. Tanpa upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh, konflik berisiko diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, rekonsiliasi harus dipahami sebagai proses strategis untuk memulihkan relasi sosial, membangun kembali kepercayaan, serta menciptakan ruang dialog yang setara dan inklusif.

Buku Rekonsiliasi Konflik dalam Masyarakat Majemuk menawarkan kerangka pemikiran, strategi, serta model-model rekonsiliasi yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial. Berbagai pendekatan yang dibahas mulai dari dialog antar kelompok, keadilan restoratif, rekonsiliasi berbasis kearifan lokal, hingga peran negara dan masyarakat sipil diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana konflik dapat ditransformasikan menjadi peluang bagi penguatan kohesi sosial.

Lebih dari sekadar kajian teoritis, buku ini juga menekankan pentingnya praktik dan pembelajaran dari berbagai pengalaman rekonsiliasi yang telah diterapkan di masyarakat majemuk. Dengan menggabungkan analisis konseptual dan contoh penerapan, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, praktisi perdamaian, serta siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap upaya membangun kehidupan sosial yang damai dan bermartabat.



IKAPI

IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

